

IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI DESA BODDIE KABUPATEN PANGKEP

Rachmawati^{1*}, Rosdianti Razak², Anwar Parawangi³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

The purpose of this study was to find out the implementation of the Family Planning Village program in Boddie Village, Mandalle District, Pangkep Regency. This study used a qualitative research method with a descriptive type of research. The data collection technique used Observation, Interview and Documentation. The results of the study in conducting the analysis have four indicators, namely: (1) communication could be seen from the delivery of information and clarity of information. The socialization had run well, and was in line with expectations because the target group already understood what the implementor had explained. (2) There were two sub-resources, namely human resources and facility resources. In the implementation of the KB village program in Boddie Village, it was optimal because human resources were still unable to support the success of the KB village program, while facility resources had been able to help facilitate implementation of information to the public. (3) The disposition of the attitude of the implementor from the implementor was quite optimal because it could provide information to the public. (4) Bureaucratic structure in implementing the program, it was inseparable from the structure that has been given the task of carrying out these activities.

Keywords: *implementation, family planning village program*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi program kampung Keluarga Berencana di Desa Boddie Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan teknik Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil Penelitian ini dalam melakukan Analisa mempunyai empat indikator yaitu: (1) komunikasi dapat dilihat dari penyampaian informasi serta kejelasan informasi. Dalam sosialisasi sudah dilakukan dengan baik dan sudah sesuai dengan harapan karena kelompok sasaran sudah memahami apa yang disampaikan implementor. (2) Sumber daya terdapat dua sub yaitu sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas. Dalam pelaksanaan program kampung KB di Desa Boddie belum dapat dikatakan optimal karena sumber daya manusia masih belum bisa menunjang keberhasilan program kampung KB, sedangkan sumber daya fasilitas sudah dapat membantu untuk memfasilitasi pengimplementasian (3) Disposisi sikap pelaksana dari implementor sudah cukup optimal karena sudah dapat memberikan informasi secara ke masyarakat. (4) Struktur birokrasi Dalam pelaksanaan program tersebut tidak terlepas dengan struktur yang telah diberikan tugas dalam menjalankan kegiatan tersebut.

Kata kunci: implementasi, program kampung keluarga berencana

* rachmawati@gmail.com

PENDAHULUAN

Permasalahan yang paling mendasar bagi negara berkembang, khususnya di Indonesia adalah jumlah penduduk yang sangat besar. Hal ini diketahui dari hasil sensus penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Penduduk Indonesia, sebagaimana sering dikemukakan, menempati urutan ke-4 di dunia dengan jumlah penduduk terbanyak pada September 2020 tercatat 270,20 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2021).

Keluarga Berencana (KB) merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat melalui kematangan pernikahan, pengendalian kelahiran, mendukung ketahanan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan keluarga serta menciptakan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera (Sumber: Amalini, 2019).

Saat ini laju pertumbuhan penduduk perlu diutamakan karena demi optimalisasi perekonomian, khususnya di Indonesia. Salah satu bentuk program yang dilakukan pemerintah bekerjasama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri kesehatan. BKKBN telah melimpahkan tugas dan

tanggung jawab kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ada di daerah untuk melaksanakan program yang telah dicanangkan yaitu Program Kampung Keluarga Berencana atau Kampung KB yang telah dilaksanakan di seluruh Indonesia (Lettiyani et al., 2020).

Lajunya pertumbuhan penduduk Indonesia berdampak pada program KB pada masyarakat. Hal itu terjadi diakibatkan kurangnya sosialisasi dari aparat pemerintah maka dari itu masyarakat kurang memahami apa itu program KB dan kurangnya kesadaran serta peran masyarakat pentingnya program KB di masyarakat, dan berkurangnya penggunaan alat kontrasepsi untuk keluarga yang telah menikah. Saat ini di Indonesia masih banyak masyarakat menengah kebawah apalagi di daerah pedesaan memilih untuk menikah muda dan keinginannya untuk menambah anggota keluarga lebih dari dua anak walaupun pemerintah sudah mencanangkan dua anak lebih baik dari slogan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan

dan Keluarga Berencana ditegaskan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak hanya membahas pada masalah Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, tetapi juga masalah Pengendalian Kependudukan terkait arah kebijakan pembangunan nasional pemerintah pada tahun 2015-2019 serta BKKBN telah diberi mandat demi kesuksesan Agenda Pembangunan Nasional (Nawacita).

Program Kampung KB memiliki implikasi strategis jangka Panjang. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga dan komunitas. Pemberdayaan sebagai strategi efektif yang dapat menyelesaikan masalah ledakan penduduk berdasarkan partisipasi masyarakat. Itu sama dengan prinsip dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat (Sumber: Aji & Yudianto P, 2020).

Kampung Keluarga Berencana atau Kampung KB merupakan salah satu program Presiden Jokowi yang telah diterapkan di Indonesia, salah satunya sudah ada di Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2016. Sejak tahun 2016 hingga tahun 2020, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sudah memiliki beberapa titik di kawasan Kampung KB. Program KB juga tidak

lagi hanya fokus dalam upaya pengendalian jumlah penduduk saja, namun juga bagaimana melalui program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) guna meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga KB masih dibutuhkan untuk memenangkan persaingan global. Kampung KB sendiri dikelola dan diselenggarakan dari, oleh serta untuk masyarakat dimana dengan memperdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat agar dapat memperoleh pelayanan program KB yang baik, demi mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera.

Kecamatan Mandalle terdiri dari 6 desa, salah satu desa terpadat yang ada di Kecamatan Mandalle adalah desa Boddie. Berdasarkan hasil pemutakhiran data keluarga tahun 2019 bahwa jumlah penduduk desa Boddie tercatat sebanyak 2.591 jiwa yang terdiri dari 1.290 jiwa laki-laki dan 1.307 jiwa perempuan. Disisi lain jumlah kepala keluarga 765 KK yang jika dirinci berdasarkan tingkat kesejahteraannya adalah: Pra Sejahtera 8 KK, Keluarga Sejahtera 350 KK, Keluarga Sejahtera II 250 KK, serta Keluarga Sejahtera III 137 KK dan KK Plus sebanyak 20 KK. Selanjutnya dalam bidang Keluarga Berencana dapat kami sampaikan bahwa jumlah peserta

KB Aktif desa Boddie sampai dengan Desember 2019 tercatat sebanyak 331 (85,88%) dari total Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 402, dengan kualitas penggunaan kontrasepsi masih didominasi oleh penggunaan kontrasepsi suntik, penggunaan kontrasepsi jangka Panjang hanya 19% dari total peserta KB aktif 331.

Dari data yang didapat terkhususnya di kampung Lamasa, dimana pelaksanaan program kampung KB sudah terlaksana yang berdasarkan data pemakai akseptor dari tahun 2018 sampai 2020 mengalami perubahan yang tidak signifikan contohnya pada pemakai akseptor yang terkhusus di suntik pada tahun 2018 berjumlah 26 orang sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 28 orang akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan hanya 25 orang.

Dari latar belakang penelitian yang ada, untuk mengetahui sejauh mana program kampung KB ini berjalan di kampung Lamasa, Desa Boddie, Kec. Mandalle, Kab. Pangkep. Sehingga Penulis mengambil judul “Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Di Desa Boddie Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep”.

Menurut Chandler dan Plano (dalam Pasolong, 2013:38), kebijakan publik adalah pemanfaatan yang

strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Menurut Thomas R. Dye (dalam Pasolong, 2013:39) Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Sumber: Liana & Santoso, 2010 hlm 7).

Kebijakan Publik (Public Policies) merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah, diformulasikan di dalam bidang-bidang isu sejak pertahanan energi, dan Kesehatan sampai kependidikan, kesejahteraan, dan kejahatan. Pada salah satu bidang isu tersebut terdapat banyak isu kebijakan, yaitu serangkaian arah tindakan pemerintah yang actual ataupun yang potensial yang mengandung konflik diantara segmen-segmen yang ada dalam masyarakat (Sumber: Dunn, 2012, hlm 109).

Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas *intelektual* yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat *politis*. Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu

atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan.

Hal terpenting dalam kebijakan negara adalah implementasi kebijakan negara. Jika suatu kebijakan telah diputuskan, maka kebijakan tersebut tidak akan berhasil dan akan terwujud jika tidak dilaksanakan. Usaha untuk melaksanakan kebijakan tentunya membutuhkan keahlian dan keterampilan dalam menguasai persoalan yang hendak dikerjakan, sehingga dalam hal ini kedudukan birokrasi menjadi strategis. Birokrasi yang berkewajiban melaksanakan kewajiban tersebut, sehingga birokrat dituntut memiliki keterampilan dan keahlian yang tinggi (Subianto, 2020:16).

Dengan mengutip Grindle (1980, Solichin Abdul Wahab (2002:59) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, implementasi kebijakan menyangkut masalah konflik, keputusan dan menyangkut siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses kebijakan bahkan mungkin jauh

lebih penting daripada perumusan kebijakan. (Sumber: Abdoellah & Rusfiana, 2016, hlm 57).

Implementasi kebijakan publik adalah proses suatu kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan tersebut disetujui. Kegiatan ini berada di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika *top-down*, yang dimaksudkan untuk menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro serta menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. (Sumber: Tachjan, 2006:25).

Menurut George C Edwards III (dalam Parawangi, 2011), terdapat empat faktor yang bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dalam proses implementasi, maka pendekatan yang ideal adalah dengan cara merefleksikan kompleksitas ini dengan keempat faktor yaitu: komunikasi, sumber-sumber, sikap pelaksana (kecenderungan-kecenderungan) atau tingkah laku dan struktur birokrasi.

Tujuan dibentuknya Kampung KB yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau sederajat melalui program KKBPK (Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga) dan pembangunan sektor

terkait lainnya untuk mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas. Sementara itu, secara khusus Kampung KB ini dibuat selain untuk meningkatkan peran serta lembaga pemerintah, non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, membantu dan membina masyarakat dalam menyelenggarakan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait, serta dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan.

Ada tiga hal pokok yang bisa dijadikan pertimbangan sebagai syarat berdirinya Kampung KB dalam suatu wilayah, yaitu: pertama, ketersediaan data kependudukan yang akurat. Kedua, dukungan serta komitmen dari Pemerintah Daerah. Dan Ketiga, adanya partisipasi aktif masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, dengan tipe penelitian adalah deskriptif, dimana yang mendeskripsikan informasi yang berhubungan dengan peristiwa ataupun fenomena yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini, informan menggunakan *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan adanya pertimbangan tertentu adalah orang yang memiliki

pengetahuan luas serta mampu menjelaskan sebenarnya tentang masalah yang diteliti. Adapun informannya berjumlah sebanyak 5 (lima) orang.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, dimana data yang diperoleh melalui narasumber atau informan atau dalam istilah responden yaitu orang yang digunakan sebagai sarana untuk memperoleh informasi di lokasi dimana penelitian dilakukan. Data Sekunder yaitu data yang didapatkan dari sumber dan bahan bacaan atau dokumentasi seperti buku, jurnal, serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 1) Observasi; 2) Wawancara; dan 3) Dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu: 1) Reduksi Data; 2) Penyajian Data; dan 3) Penarikan Kesimpulan.

Dalam pengabsahan data dari penelitian ini adalah Triangulasi. Triangulasi yaitu sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik dan sumber data yang ada. Triangulasi ada tiga bagian yaitu: 1) Triangulasi

Sumber dilaksanakan dengan cara memeriksa data yang diperoleh dari berbagai sumber. 2) Triangulasi Teknik dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda. Informasi yang ditemukan melalui wawancara, diperiksa dengan observasi dan dokumen. 3) Triangulasi Waktu yaitu dalam hal pengujian kredibilitas data dapat dilaksanakan dengan melakukan pengecekan melalui wawancara, observasi, atau teknik lain pada waktu atau situasi yang berbeda.

HASIL PEMBAHASAN

Implementasi program Kampung KB yang ada di Kampung Lamasa Desa Boddie yaitu sebagai salah satu program dari BKKBN guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kampung KB yang ada di Lamasa Desa Boddie di canangkan pada tanggal 03 Maret 2017 sesuai surat keputusan kepala Desa Boddie. Kampung KB di Desa Boddie sudah melaksanakan beberapa program sesuai dengan yang telah direncanakan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pencapaian program Kampung KB ini terlaksana guna mensejahterakan masyarakat Kampung Lamasa Desa Boddie. Setelah dilakukan penelitian dan pengumpulan data saat dilapangan, baik itu observasi dan wawancara

dengan informan, maka peneliti memperoleh data serta informasi mengenai program kampung KB di Kampung Lamasa Desa Boddie. Peneliti menggunakan Teori dari George C. Edwards III (dalam Parawangi ,2011) sebagai indikator untuk melihat sejauh mana keberhasilan/efektifitas dari implementasi program kampung KB di Kampung Lamasa Desa Boddie.

Komunikasi

Dalam menentukan keberhasilan tujuan dari suatu implementasi kebijakan publik terkhususnya dalam kebijakan pemerintah yaitu program Kampung Keluarga Berencana harus membutuhkan komunikasi yang baik. Dalam menghasilkan suatu implementasi yang efektif para pembuat keputusan perlu mengetahui tugas masing-masing yang akan mereka kerjakan, sehingga dalam setiap keputusan dan kebijakan harus di komunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Dalam variabel komunikasi ada beberapa indikator yang dapat mendukung keberhasilan implementasi, yaitu: penyampaian informasi, kejelasan dalam menyampaikan program tersebut serta konsistensi dari pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terkait program kampung KB di Kampung Lamasa Desa Boddie Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep terkait dengan komunikasi yang dimana sudah terlaksana sejak awal pencanangan hingga saat sekarang ini yang menunjukkan bahwa masyarakat telah mengetahui adanya program kampung KB dan telah mengetahui informasi mengenai program KB tersebut. dalam koordinasi yang dilakukan baik dari pihak PLKB Kecamatan, PKB Desa Boddie, PPKBD/SUB PPKBD, Kader-kader lainnya, serta masyarakat sudah terjalin dengan baik. Sehingga koordinasi sudah sesuai yang diharapkan.

Dalam menerapkan program kampung KB dilakukan dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat dan itu sudah dilakukan oleh pihak implementor yaitu dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait informasi program Kampung KB dan membuat tugu selamat datang Kampung keluarga Berencana. Bentuk sosialisasi terus diupayakan dan pihak implementor sangat konsisten dalam menyampaikan informasi, yang tidak hanya menggugurkan kewajiban saja tetapi berguna dapat berguna untuk masyarakat agar direalisasikan.

Mengenai kejelasan informasi terkait kampung KB pun sudah cukup jelas sesuai dengan informasi yang diungkapkan ibu Hatijah bahwa kejelasan informasi terkait sosialisasi sudah jelas karena pihak implementor sudah meminta bantuan kepada pihak organisasi eksternal untuk membantu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya program Kampung KB ini.

Sumber Daya

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu unit kebijakan yang mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif. Tanpa sumberdaya kebijakan yang ditetapkan tidak bisa terlaksana sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan. Adapun SDM yang dimaksud dalam penulisan ini adalah ketersediaan staf atau pelaksana dari yang menangani program kampung Keluarga Berencana (KB). Kemudian adanya fasilitas (sarana prasarana) yang disediakan oleh pelaksana kebijakan di wilayah kampung Lamasa Desa Boddie guna menjunjung proses implementasi kebijakan terkait program Kampung Keluarga Berencana (KB).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada sebenarnya belum bisa dikatakan cukup tetapi pihak UPT

berusaha untuk meningkatkan kualitas sosialisai mengenai program kampung KB. Kepala PKB di kecamatan mandalle juga menyerahkan kepada Kepala PPKBD guna untuk melaksanakan kegiatan atau program kerja yang ada. Sumberdaya manusia sangat berperan penting untuk menjalankan kebijakan yang ditetapkan. Para pelaksana juga sudah memiliki kemauan yang kuat dalam melaksanakan program tersebut. Walaupun masyarakat Sebagian besar sudah ikut berpartisipasi tetapi masih ada beberapa masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya program Kampung KB tersebut. Pelaksana program selalu mengingatkan kepada masyarakat akan pentingnya keberhasilan dalam program Kampung KB ini, dimana sejak awal sudah melakukan Kerjasama dengan organsiasi eksternal guna keberhasilan kebijakan tersebut.

Kemudian mengenai sarana dan prasarana sudah optimal karena sudah tersedianya pendukung dalam pengimplementasian program tersebut yaitu dengan adanya sekretariat yang dijadikan sebagai rumah dataku serta diberikan fasilitas guna menunjang pelaksanaan program kerja yang sedang dilaksanakan.

Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi atau sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan, terkhusus terhadap sikap implementor. Disposisi tersebut terkait bagaimana pembagian tugas dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. Jika sikap dari pembuat kebijakan dengan implementor itu berbeda maka implementasi tersebut akan terjadi banyak masalah.

Berdasarkan hasil penelitian yang terdapat di kampung KB di Desa Boddie secara keseluruhan bahwa pihak petugas baik yang ada di kecamatan ataupun di desa dalam disposisikan kegiatan dari Program Kampung KB kepada seluruh staff lainnya dengan tidak terlepas adanya aturan serta ketika ada kendala tetapi dapat terselesaikan dengan baik. Apalagi dalam melakukan sosialisasi, Ketika terjadi masalah terkait disposisi kegiatan Program Kampung KB pasti dapat dikendalikan dengan cepat karena pihak kepala UPT selalu berkoordinasi dengan staff yang bersangkutan Ketika adanya masalah. Walaupun beberapa masalah dapat diatasi tetapi diharapkan masyarakat bisa memanfaatkan sosialisasi yang telah diberikan serta dapat merealisasikannya. Kemudian para pelaksana Program tersebut memiliki

pemahaman serta pengetahuan yang luas karena dapat menjelaskan serta memberi informasi kepada masyarakat secara jelas sehingga masyarakat jadi paham akan pentingnya dari penerapan suatu kebijakan yang dilaksanakan.

Struktur Birokrasi

Dalam melaksanakan kebijakan yang ada pasti tidak terlepas dari adanya struktur organisasi, pembagian kekuasaan, serta hubungan antar unit-unit organisasi yang ada terjalin secara terus menerus yang memiliki hubungan baik potensial maupun nyata dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Dari hasil penelitian yang ada bahwa kegiatan dari program Kampung KB yang sedang dijalankan masyarakat, tidak terlepas dari struktur yang telah diberikan tugas dalam menjalankan kegiatan dari program Kampung KB dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan yang ada. Dengan adanya program Kampung KB masyarakat langsung tahu informasi yang diberikan kepada tim penyuluh KB mengenai bahaya dari seorang ibu Ketika terlalu sering melahirkan serta mengetahui bahwa faktor umur juga menjadi penting bagi seorang ibu hamil. Kegiatan yang dilakukan oleh birokrasi yang bersosialisasi mengenai program Kampung KB dimana sebelumnya

masih terjadinya angka kelahiran yang tinggi serta kepadatan penduduk terjadi, tetapi setelah adanya program KB ini masyarakat dapat bekerja sama dan berpartisipasi dengan melakukan KB guna menekan kepadatan penduduk.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) komunikasi yang dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi serta pendampingan yang sudah diberikan untuk masyarakat sudah dilakukan dengan baik dan sarana dan prasarana sudah mendukung dalam pengimplementasian. Kemudian dari adanya sosialisasi tersebut masyarakat sudah bisa menerima dan mengerti informasi dari pihak pembuat kebijakan tersebut. 2) Sumber Daya terbagi menjadi dua sbu indikator yaitu Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Fasilitas, akan tetapi SDM yang dimiliki masih belum tercukupi, apalagi terkait untuk memberikan penyuluhan ataupun pendampingan mengenai program Kampung KB. Fasilitas yang dimiliki sudah mencukupi untuk melakukan pengimplementasian. 3) Disposisi atau Sikap pelaksana, dimana Pihak Implementor melakukan pembagian tugas kepada staff yang ada tetapi tidak terlepas adanya aturan serta ketika ada kendala tetapi dapat terselesaikan

dengan baik. Apalagi dalam melakukan sosialisasi, Ketika terjadi masalah terkait Disposisi kegiatan Program Kampung KB pasti dapat dikendalikan dengan cepat karena pihak kepala UPT selalu berkoordinasi dengan staff yang bersangkutan ketika terjadi masalah. Kemudian terkait pengetahuan dan pemahaman implementor sudah cukup optimal, karena masyarakat mengerti dan paham terkait informasi yang diberikan sehingga pelaksanaan program kerja dapat berjalan dengan baik. 4) Struktur Birokrasi, Dalam pelaksanaan program tersebut tidak terlepas dengan struktur yang telah diberikan tugas dalam menjalankan kegiatan tersebut sehingga dapat berjalan baik karena sudah diatur sesuai penempatannya setiap bidang-bidang sehingga sudah terkoordinasi untuk membuat kerja sama yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Aji, M. S., & Yudianto, G. P. H. (2020). Pemberdayaan Masyarakat “Kampung KB” Ditinjau dari Perspektif Ottawa Charter. *Jurnal PROMKES*, 8(2), 206. <https://doi.org/10.20473/jpk.v8.i2.2020.206-218>
- Amalini, M. P. (2019). Strategi Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dalam Meningkatkan Pengguna Program Di Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 7(3), 1379–1390.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Hasil Sensus Penduduk 2020*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>
- Dunn, W. N. (2012). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lettiyani, E., Isabella, & Kencana, N. (2020). *Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Sribunga Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT)*. *Jurnal Pemerintahan & Politik* 5(3), 1–9.
- Liana, D. A., & Santoso, S. (2010). *Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Blora (Studi Kasus Pasar Blora Kota)*. 9(1), 76–99.
- Parawangi, Anwar. (2011). *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Di Kabupaten Bone)*. Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Surabaya: Brilliant.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.